

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Pernyataan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Istilah	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Intisari	xiv
<i>Abstract</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Konsep Desentralisasi.....	24
2.2 Desentralisasi di Negara Federal dan Sentralisasi di Negara Kesatuan	32
2.3 Konsep Pemekaran Daerah	42
2.4 Konsep Penataan Kelembagaan.....	48
2.5 Konsep Penataan Sumberdaya Aparatur.....	59
2.6 Konsep Konflik Kepentingan	67
2.4.1. Konflik Kepentingan Dalam Pemekaran Daerah	100
2.4.2. Konflik Kepentingan Dalam Penataan Kelembagaan.....	105
2.4.3. Konflik Kepentingan Dalam Penempatan SD Aparatur	110
2.7 Konsep <i>Advocacy Coalition Framework</i>	115
2.8 Kerangka Pikir	122
BAB III METODE PENELITIAN	128
3.1 Jenis Penelitian	128
3.2 Fokus Penelitian	129
3.3 Jenis Data	129
3.4 Lokasi Penelitian	130
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	130
3.6 Teknik Analisa Data	131
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	133
4.1 Kondisi Geografis.....	133
4.2 Sejarah Pembentukan Presidium.....	137

4.3	Perkembangan Pemerintahan Daerah.....	149
4.3.1.	Dasar Hukum	149
4.3.2.	Visi dan Misi.....	153
4.3.3.	Satuan Perangkat Daerah.....	154
4.3.4.	Kerjasama Antar Daerah.....	156
4.3.5.1.	Kerjasama Antar Daerah.....	156
4.3.6.2.	Kerjasama Daerah Pihak Ketiga	157
4.4	Potensi Daerah	157
4.4.1	Bidang Pertanian.....	157
4.4.2	Bidang Perkebunan.....	157
4.4.3	Bidang Peternakan	158
4.4.4	Bidang Perikanan dan Kelautan.....	158
4.4.5	Bidang Kehutanan.....	159
4.4.6	Bidang Industri	160
4.4.7	Bidang Pertambangan.....	160
4.4.8	Bidang Pariwisata	160
BAB V	PERKEMBANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN	162
5.1.	Perkembangan Sebelum Pemekaran	162
5.1.1	Bidang Pendidikan	162
5.1.2	Bidang Kesehatan.....	167
5.1.3	Bidang Ekonomi.....	173
5.2.	Perkembangan Sesudah Pemekaran	177
5.2.1	Bidang Pendidikan	177
5.2.2	Bidang Kesehatan.....	180
5.2.3	Biadang Ekonomi	183
5.3.	Kesimpulan	187
BAB VI	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMEKARAN	192
6.1.	Penataan Kelembagaan.....	192
6.1.1	Tata Laksana dan Prosedur Pemekaran.....	192
6.1.2	Pelaksanaan Pemerintahan Pasca Pemekaran.....	200
6.2.	Kesimpulan	207
BAB VII	PENEMPATAN SUMBERDAYA APARATUR DAERAH	210
7.1	Penempatan Sumber Daya Aparatur Daerah	210
7.1.1	Pendidikan.	210
7.1.2	Rekrutmen.....	217
7.1.3	Promosi.....	223
7.1.4	Remunerasi.....	227
7.1.5	Disiplin Kerja	231
7.2.	Kesimpulan	236

BAB VIII ANALISI KONFLIK KEPENTINGAN DAN PENYELESAIANYA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMEKARAN.....	240
8.1. Analisis Konflik Kepentingan Kelembagaan.....	240
8.2. Kesimpulan dan Analisis.....	261
BAB IX ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN DAN PENYELESAINYA DALAM PENEMPATAN SUMBERDAYA APARATUR DAERAH PEMEKARAN	265
9.1. Analisis Konflik Dalam Penempatan Sumberdaya Aparatur	265
9.1.1 Konflik Kepentingan Dalam Penentuan Pejabat Bupati	265
9.1.2 Konflik Kepentingan Dalam Penentuan Sekda	272
9.1.3 Konflik Kepentingan Dalam Penentuan Kadin SKPD.....	277
9.1.4 Konflik Kepentingan Dalam Penempatan Pegawai.....	283
9.2. Kesimpulan dan Analisis	290
BAB X PENUTUP	294
x.1. Kesimpulan	294
x.2. Implikasi Empirik	297
x.2. Implikasi Teoritis	299
DAFTAR PUSTAKA	304
LAMPIRAN-LAMPIRAN	